

Pendidikan Politik

by Iqbal Miftakhul Mujtahid

Submission date: 24-May-2021 07:13AM (UTC+0700)

Submission ID: 1592628415

File name: iqbal_m_mujtahid__hascaryo_pramudibyanto.pdf (262.18K)

Word count: 6894

Character count: 46862

Pendidikan Politik Terpadu Bagi Masyarakat Menuju Pemilu 2014 Sesuai Dengan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas

Iqbal M. Mujtahid (iqbal@ut.ac.id)
Hascaryo Pramudibyanto (hascaryo@ut.ac.id)

Abstrak

Sebagai perwujudan bukti sebuah negara menerapkan sistem demokrasi ialah dengan menggelar perhelatan pemilihan umum. Sistem pemilihan umum merupakan salah satu sistem atau kelembagaan penting di dalam sistem demokrasi. Penerapan sistem pemilihan umum di Indonesia masih terbilang belum sepenuhnya mampu merepresentasikan kehendak masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia pada umumnya telah mampu mengikuti proses pemilu dan menghormati hasil pemilu, namun pemilu di Indonesia masih banyak menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Pemilu menjadi indikator yang paling mudah dalam menentukan sebuah negara tersebut demokratis atau tidak, karena Pemilu memberikan sebuah momentum kepada masyarakat untuk menentukan arah perkembangan sebuah negara. Momentum ini merupakan tugas pokok dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Salah satu tugas dan kewenangan KPU yaitu melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilu serta tugas dan kewenangan KPU kepada masyarakat. Pemilih merupakan ujung tombak untuk menentukan calon yang terpilih pada proses Pemilu. Oleh karena itu, banyak permasalahan yang muncul seperti; *money politic*, penggelembungan suara, pemilih ganda, pemalsuan daftar mata pilih, yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Pemilu. Hal tersebut merupakan bentuk dari penyalahgunaan kekuasaan dalam Pemilu, yang seharusnya tidak dilakukan. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya suara mereka sebagai pemilih menimbulkan keprihatinan mendalam. Dimana masyarakat sekarang ini sudah menjadi masyarakat yang apatis terhadap pemerintah.

Sebuah tawaran bagi penyelesaian permasalahan dalam proses pemilu yaitu dengan pendidikan politik terpadu. Pendidikan politik terpadu merupakan jawaban intelektual dari persoalan pemilu yang semakin lama semakin tidak jelas arahnya dan semakin banyak penyimpangan yang terjadi. Pendidikan politik bagi pemilih perlu mendapatkan fokus yang jelas. Ini terkait dengan proses segmentasi pendidikan pemilih. Pemilih pemula merupakan segmentasi penting dalam upaya melakukan pendidikan bagi pemilih dan tentunya pendidikan bagi pemilih pemula ini tidak hanya dilakukan ketika masuk usia pilih. Kurangnya informasi penting mengenai proses pemilihan merupakan masalah yang harus ditangani secara serius karena hal ini harus dimengerti oleh masyarakat yang memilih dalam pemilu. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu diperlukan sumber informasi seperti brosur, iklan di media cetak/internet, surat-surat melalui pos, kampanye iklan di radio, poster, debat/dialog kandidat pemilu dan lain-lain. Jika pemilih secara keseluruhan sudah memiliki pengetahuan mengenai politik dan pemilu, bukan tidak mungkin korupsi dapat dihindarkan bahkan dihilangkan. Karena masyarakat akan menjadi pengawas atas segala penyelenggaraan kegiatan negara, sesuai dengan kedaulatan berada ditangan rakyat.

Dalam makalah ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana akan menggunakan teknik pengumpulan data survei dengan wawancara mendalam terhadap beberapa masyarakat yang dianggap sudah masuk usia peserta pemilih, dan pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan pemilu.

Kata Kunci: Pendidikan Politik Terpadu, Pemilu, Tugas dan Kewenangan KPU, Pemilih, Sistem Politik, Korupsi.

I.1 Latar Belakang

Sebagai perwujudan bukti sebuah negara menerapkan sistem demokrasi ialah dengan menggelar perhelatan pemilihan umum. Pemilihan umum diharapkan mampu merefleksikan kedaulatan rakyat sepenuhnya, khususnya dalam penyaluran aspirasi dan pemenuhan hak politik bagi rakyat. Selanjutnya pemilihan umum dapat pula berfungsi sebagai sarana legitimasi politik, perwakilan atau representasi politik, mekanisme pergantian kekuasaan atau sirkulasi elit dan sebagai sarana pendidikan dan sosialisasi politik yang bersifat massal dan *periodic*. Disisi lain adanya kejelasan sistem pemilu sangat berpengaruh terhadap ketahanan nasional karena dapat mempengaruhi sistem partai, sistem kabinet pemerintahan, mekanisme hubungan kerja antar lembaga negara dan tertinggi negara, alat proses budaya politik yang berkembang di masyarakat.

Sistem pemilihan umum merupakan salah satu sistem atau kelembagaan penting di dalam sistem demokrasi. Pemilu merupakan sarana langsung bagi masyarakat yang cukup usia untuk berpartisipasi dalam mempengaruhi pengambilan keputusan. Tahapan proses pemilu antara lain: penetapan daftar pemilih, tahap pencalonan kandidat, tahap kampanye, tahap pemungutan serta penghitungan suara, dan hasil perolehan suara sehingga kita dapat menentukan kandidat yang terpilih.

Penerapan sistem pemilihan umum di Indonesia masih terbilang belum sepenuhnya mampu merepresentasikan kehendak rakyat Indonesia. Pasca reformasi perubahan sistem pemilu yang sebelumnya menggunakan sistem pemilihan proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka memang relevan bagi sosio-kondisi Indonesia sendiri dan tuntutan rakyat untuk menyelenggarakan pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan kata lain sangat diharapkan adanya transparansi terhadap penyelenggaraan pemilihan umum.

Penilaian sistem pemilu dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yaitu kondisi sistem ekonomi, kondisi lembaga-lembaga politik, proses pemungutan suara, proses pemilihan kepala daerah, tatacar pemilihan, tingkah laku masyarakat dalam memilih, partisipasi perempuan dalam partai politik, pendapat masyarakat mengenai demokrasi, dan munculnya masalah-masalah baru dalam pemilu. Kandidat yang maju telah diseleksi sebelumnya karena harus memenuhi persyaratan dan sistem sesuai peraturan yang berlaku. Sistem pemilu saat ini merencanakan bayak pemilu kepala daerah sehingga dalam melakukan proses pemungutan suara diperlukan informasi dan tatacara pemilu yang efektif kepada masyarakat luas.

Masyarakat Indonesia pada umumnya telah mampu mengikuti proses pemilu dan menghormati hasil pemilu, namun pemilu di Indonesia masih banyak menghadapi kendala-kendala-kendala dalam pelaksanaannya. Kendala utama dalam pemilu yaitu pemberian informasi kepada masyarakat mengenai proses-proses utama dalam pemilihan kepala daerah. Perlunya peningkatan informasi kepada masyarakat mengenai proses pemilu yang penting seperti informasi kepada masyarakat mengenai proses pemilu yang penting seperti informasi pra kandidat, proses pencalonan kandidat, proses penghitungan suara sampai calon terpilih, kampanye pemilu yang dilakukan, cara masyarakat mendaftar diri sebagai pemilih, tata cara yang tepat memadai surat suara, dan dimana serta kapan harus memilih.

1.2 Pokok Permasalahan

Kurangnya informasi penting mengenai proses pemilihan merupakan masalah yang harus ditangani secara serius karena hal ini harus dimengerti oleh masyarakat yang memilih dalam pemilu. Maka yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu melakukan pendidikan dan pemberian informasi yang lengkap terhadap masyarakat sebagai pemilih. Pemberian pendidikan proses pemilu harus memperhatikan latar belakang masyarakat yang bervariasi agar informasi yang disampaikan dapat dimengerti oleh semua lapisan masyarakat Indonesia.

Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu diperlukan sumber informasi seperti brosur, iklan di media cetak/internet, surat-surat melalui pos, kampanye iklan di radio, poster, debat/dialog kandidat pemilu dan lain-lain. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga yang berwenang dalam proses pemilu merupakan sistem penting dalam pelaksanaan pemilu, sehingga diperlukan peran lembaga-lembaga pemilu yang efektif dan mampu menjaga nama baiknya. Tingkat kepercayaan masyarakat pula harus di dukung oleh anggota lembaga-lembaga pemilu yang memiliki keahlian mengatasi masalah-masalah pemilu dan mampu bersikap adil dengan tidak memihak salah satu partai politik.

Hal utama yang harus dilakukan pemilih yaitu memastikan namanya ada dalam daftar pemilih, namun pada umumnya telah ada petugas pemilu yang mendatangi tiap rumah untuk mendata. Daftar pemilih harus akurat sehingga masyarakat harus menunjukkan dokumen sah yaitu kartu pemilih dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) agar proses pemilu berjalan dengan efektif. Pada praktek pemilihan, masyarakat akan dihadapkan pada prosedur pemilihan yaitu cara melakukan pengecekan daftar pemilih, dan cara menandai kartu suara secara benar. Hal tersebut harus dimengerti oleh masyarakat, namun kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum paham dalam melakukan prosedur pemilihan. Masyarakat juga mengalami

karena cara menandai surat suara selalu berubah dari satu pemilu ke pemilu yang lain dan kurangnya informasi mengenai perubahan tersebut. Maka lembaga-lembaga pemilu harus mulai memusatkan perhatian dalam pemberian informasi yang tepat terhadap masyarakat untuk menyelesaikan masalah prosedur pemilihan. Oleh karena itu makalah ini akan membahas mengenai bagaimana pendidikan politik terpadu bagi masyarakat menuju Pemilu 2014 sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas studi kasus di Kota Bengkulu?

I.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan makalah ini yaitu:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan pendidikan politik terpadu dimasyarakat, khususnya di wilayah Kota Bengkulu.
2. Untuk menerapkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemilu, sehingga tercipta pemilu yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

KERANGKA TEORI

II.1 Pendidikan Politik Terpadu

Pendidikan politik (*political education*) adalah pendidikan kewarganegaran (*civic education*) untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara atau lebih tepat lagi disebut pendidikan politik adalah pendidikan demokrasi (*democracy education*), pendidikan yang mewujudkan masyarakat demokratis, yaitu masyarakat yang bebas (*free society*) yang hanya dibatasi oleh kebebasan itu sendiri, bukan masyarakat kolektivisme yang “terpasung” oleh atribut-atribut agama atau norma-norma budaya.

Pendidikan politik mampu melahirkan budaya politik yang sehat, yang hingga pada akhirnya berhasil mewujudkan masyarakat demokratis yang bebas dari bias apapun. Politik yang sehat tentu menjadi syarat utama dalam menghasilkan masyarakat demokratis tersebut. Sebab, tanpa berjalannya politik yang sehat maka tentu masyarakat demokratis atau demokrasi itu sendiri kehilangan arahnya sehingga muncullah kebebasan yang tidak terkontrol, yang pada akhirnya mencederai demokrasi itu sendiri. Disini lah sebenarnya relevansinya pendidikan politik sebagai upaya penguatan terwujudnya masyarakat demokratis, tentu melihat ini dalam konteks demokrasi kita yang berjalan merupakan sebuah keniscayaan dalam upaya mereorientasi pendidikan politik yang telah atau sedang berlangsung. Makalah ini dimaksudkan untuk mendiskusikan. Kenyataan yang sesungguhnya dalam ranah praktek pendidikan politik bangsa ini.

Pendidikan politik adalah segala sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan urusan yang menyangkut kepentingan dari sekelompok masyarakat (negara) guna mengetahui hak-hak dan kewajibannya. Pendidikan politik merupakan proses mempengaruhi individu agar dia mendapatkan Mendapatkan informasi, wawasan dan ketrampilan politik sehingga sanggup berikap kritis dan lebih intesional terarah hidupnya. Selain itu bisa menjadi warga Negara yang lebih mantap, tidak terapung tanpa bobot dan tanpa pengaruh orientasi terhadap keadaan sendiri dan kondisi lingkungannya.

Pendidikan politik menjadi penting bagi mahasiswa sebagai upaya penyampaian (penanaman) nilai-nilai pengetahuan dan ideologi warganegara mengenai bagaimana diberlakukannya sistem, regulasi dan kebijakan negara termasuk hal yang dirumuskan oleh kebijakan dan demokrasi politik. Pengetahuan ini penting untuk dimiliki mahasiswa guna untuk mengenali hak-haknya dalam upaya berpartisipasi menegakkan keadilan dan demokrasi. Dengan demikian, pendidikan politik menjadi tanggung jawab bagi perguruan tinggi selain itu juga penting untuk semua pihak, seperti pemerintah, lembaga politik, LSM, media massa serta komponen-komponen masyarakat lainnya.

Terdapat tiga kemungkinan variasi pembelajaran terpadu yang berkenaan dengan pendidikan yang dilaksanakan dalam suasana pendidikan progresif yaitu kurikulum terpadu (*integrated curriculum*), hari terpadu (*integrated day*), dan pembelajaran terpadu (*integrated learning*). Kurikulum terpadu adalah kegiatan menata keterpaduan berbagai materi mata pelajaran melalui suatu tema lintas bidang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna sehingga batas antara berbagai bidang studi tidaklah ketat atau boleh dikatakan tidak ada. Hari terpadu berupa perancangan kegiatan siswa dari sesuatu kelas pada hari tertentu untuk mempelajari atau mengerjakan berbagai kegiatan sesuai dengan minat mereka. Sementara itu, pembelajaran terpadu menunjuk pada kegiatan belajar yang terorganisasikan secara lebih terstruktur yang bertolak pada tema-tema tertentu atau pelajaran tertentu sebagai titik pusatnya (*center core / center of interest*).¹ Menurut Prabowo, pembelajaran terpadu adalah suatu proses pembelajaran dengan melibatkan / mengkaitkan berbagai bidang studi. Dan ada dua pengertian yang perlu dikemukakan untuk menghilangkan kerancuan dari pengertian pembelajaran terpadu di atas, yaitu konsep pembelajaran terpadu dan IPA terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan pendekatan belajar mengajar yang melibatkan beberapa bidang studi. Pendekatan belajar mengajar seperti ini diharapkan akan dapat memberikan

1 Prabowo. 2000. *Pembelajaran Fisika Dengan Pendekatan Terpadu Dalam Menghadapi Perkembangan IPTEK Millenium III*. Jakarta: Himpunan Fisika Indonesia.

pengalaman yang bermakna kepada anak didik kita. Arti bermakna disini dikarenakan dalam pembelajaran terpadu diharapkan anak akan memperoleh pemahaman terhadap konsep-konsep yang mereka pelajari dengan melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami.²

Pembelajaran terpadu merupakan pendekatan belajar mengajar yang memperhatikan dan menyesuaikan dengan tingkat perkembangan anak didik (*Developmentally Appropriate Practical*). Pendekatan yang berangkat dari teori pembelajaran yang menolak drill-system sebagai dasar pembentukan pengetahuan dan struktur intelektual anak. Langkah awal dalam melaksanakan pembelajaran terpadu adalah pemilihan/ pengembangan topik atau tema. Dalam langkah awal ini guru mengajak anak didiknya untuk bersama-sama memilih dan mengembangkan topik atau tema tersebut. Dengan demikian anak didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan pembuatan keputusan.

Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan terpadu ini diharapkan akan dapat memperbaiki kualitas pendidikan dasar, terutama untuk mencegah gejala penjejalan kurikulum dalam proses pembelajaran di sekolah. Dampak negatif dari penjejalan kurikulum akan berakibat buruk terhadap perkembangan anak. Hal tersebut terlihat dengan dituntutnya anak untuk mengerjakan berbagai tugas yang melebihi kapasitas dan kebutuhan mereka. Mereka kurang mendapat kesempatan untuk belajar, untuk membaca dan sebagainya. Disamping itu mereka akan kehilangan pengalaman pembelajaran alamiah langsung, pengalaman sensorik dari dunia mereka yang akan membentuk dasar kemampuan pembelajaran abstrak.

II.2 Transparansi

Transparansi berasal dari kata *transparency* yang merupakan kata sifat dari *transparent* yaitu kata yang menyatakan keadaan yang transparan.³ Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.⁴

Dalam konteks pembangunan, transparansi adalah keadaan dimana setiap orang dapat mengetahui proses pembuatan dan pengambilan keputusan di pemerintahan umum. Menurut

2 Prabowo. 2000 . *Ibid*.,

3 ----, ----. *Webster International Dictionary*. Massachussets: Merriam Company.

4 Bappenas dan Depdagri. 2002. *Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*. Hal 18

Undang-undang nomor 28 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, azas keterbukaan (transparansi) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah azas untuk membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Menurut UNDP, transparansi akan tercapai dengan cara membagi atau menyebarkan informasi dan bertindak dengan cara yang terbuka. Hal tersebut berarti memperbolehkan para *stakeholder* untuk memperoleh informasi. Sistem yang transparan memiliki prosedur yang jelas dalam pengambilan keputusan publik dan adanya saluran komunikasi yang terbuka antara berbagai *stakeholder* dengan aksesibilitas yang baik terhadap sumber informasi. Transparansi dibangun berdasarkan kebebasan untuk memperoleh informasi. Proses, kelembagaan, dan informasi tersedia secara langsung terutama bagi pihak-pihak yang berkepentingan.⁵

II.3 Akuntabilitas

Dalam buku *Bureaucracy and Democracy, Accountability And Performance*, Gormley dan Balla (2004:5-9) yang mengutip pendapat Behn (2001), bahwa akuntabilitas dalam pembuatan keputusan yang demokratis dapat dilihat dari sudut pandang keadilan. Artinya bahwa semua pihak yang ikut serta dalam setiap proses pembuatan keputusan seharusnya diberi kesempatan untuk membuat pilihan yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan ketahui. Prinsip ini diwujudkan dalam *Administrative Procedure Act*, dimana peraturan perundang – undangan mengatur lembaga – lembaga pemerintah untuk membuat kebijakan atau keputusan yang penting dan melibatkan usulan atau pendapat pihak lain.

Masih menurut Gormley yang mengutip Romzek dan Dubnick (1987):

”akuntabilitas dalam cabang eksekutif, difungsikan untuk membedakan antara sumber pengawasan dari “luar dan dalam” serta tinggi atau rendahnya derajat pengawasan dari lembaga pengawas”.⁶

5 UNDP. 2001. *Transparency and Accountability*. <http://www.pogar.org/themes/transparency.html>.

6 William T. Gormley and Steven J. Balla. 2004. *Bureaucracy and Democracy, Accountability and Performance*. Washington DC : CQ Press.

Dalam akuntabilitas birokrasi, akuntabilitas yang diharapkan dibangun melalui susunan hirarki berdasarkan hubungan antar pengawas/badan pengawas. Akuntabilitas legal/hukum dibangun berdasarkan hubungan kontraktual, sedangkan untuk akuntabilitas profesional berdasarkan keahlian dari pengawas. Kemudian dalam akuntabilitas politik melihat bagaimana respon atau ketanggapan dari konstitusi sebagai alat utama dalam melihat berbagai keinginan/kebutuhan.⁷

Menurut William dan Steven yang mengutip Romzek dan Dubnick (1987), akuntabilitas dalam cabang eksekutif, difungsikan untuk membedakan antara sumber pengawasan dari “luar dan dalam (*external and internal control*)” serta tinggi atau rendahnya derajat pengawasan dari lembaga pengawas. Dalam akuntabilitas birokrasi, akuntabilitas yang diharapkan dibangun melalui susunan hirarki berdasarkan hubungan antar pengawas/badan pengawas. Akuntabilitas legal/hukum dibangun berdasarkan hubungan kontraktual, sedangkan untuk akuntabilitas profesional berdasarkan keahlian dari pengawas. Kemudian dalam akuntabilitas politik melihat bagaimana respon atau ketanggapan dari konstitusi sebagai alat utama dalam melihat berbagai keinginan/kebutuhan.⁸

Kemudian menurut Polidano, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.⁹ Tiga dimensi akuntabilitas yaitu:

- Akuntabilitas Politik, biasanya dihubungkan dengan proses dan mandat pemilu, yaitu mandat yang diberikan masyarakat kepada para politisi yang menduduki posisi legislatif dan eksekutif dalam suatu pemerintahan.
- Akuntabilitas Finansial, fokus utamanya adalah pelaporan yang akurat dan tepat waktu tentang penggunaan dana publik, yang biasanya dilakukan melalui laporan yang telah diaudit secara profesional.

7 William T. Gromley and Steven J. Balla. 2004. *Op cit*.

8 Gormley, T. William Jr, and J. Balla, Steven, 2004. *Bureaucracy and Democracy, Accountability and Performance*. Washington D.C.: CQ Press.

9 Polidano, C., “Why Bureaucrats Can’t Always Do What Ministers Want: Multiple Accountabilities in Westminster Democracies.” *Public Policy and Administration* 13, No. 1, 1998.

- Akuntabilitas Administratif, merujuk pada kewajiban untuk menjalankan tugas yang telah diberikan dan diterima dalam kerangka kerja otoritas dan sumber daya yang tersedia.

Pengertian lainnya, akuntabilitas dapat berarti kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja tindakan seseorang atau badan kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban/keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu. Dengan kata lain, akuntabilitas merupakan seluruh aspek tingkah laku seseorang (*behaviour*), dapat mencakup kelakuan baik yang bersifat pribadi atau disebut akuntabilitas spiritual, maupun yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan orang-orang yang berada dilingkungannya atau akuntabilitas nonspiritual. Oleh karena itu, setiap pribadi atau orang harus benar-benar dapat menyadari bahwa setiap tindakannya akan dapat berpengaruh terhadap orang lain maupun pada dirinya sendiri, juga dapat berdampak pada lingkungannya.¹⁰

METODE PENELITIAN

III.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu cara bagaimana melihat dan mempelajari gejala atau realitas sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis. Kriteria kualitas penelitian positivistik antara lain terlihat dari segi metodologi yang mencakup reabilitas, validitas, dan objektivitas. Reabilitas adalah pemakaian istilah untuk menunjukkan konsistensi dari data yang dikumpulkan terhadap data yang diperoleh dari sumber lain, serta sejalan dengan apa yang sudah diketahui orang. Validitas yang dimaksud merupakan suatu keyakinan bahwa analisis dan data yang dikumpulkan benar-benar menggambarkan apa yang terjadi di tempat penelitian. Objektivitas merupakan suatu pengukuran yang bebas dari penilaian yang subjektif.

Terkait dengan objektivitas, Neuman (2006) menyatakan bahwa pada penelitian dengan paradigma positivis, peneliti harus obyektif dan netral dalam mengukur aspek kehidupan sosial, memeriksa bukti, dan memperhatikan penelitian lainnya. Menurutnya, *the researcher remains detached, neutral, and objective as he or she measures aspect of social life, examines evidence, and replicates the research of the others* (p. 98).

Melalui pendekatan positivis ini, peneliti ingin mengetahui dan mencapai sebuah pemahaman yang mendalam serta komprehensif mengenai pendidikan politik terpadu bagi masyarakat menuju Pemilu 2014 sesuai dengan prinsip transparansi dan

¹⁰ Polidano, C., *op cit*. Hal: 28.

akuntabilitas, dengan menggunakan alur berpikir deduktif dengan mendasarkan pada beberapa teori yang diuji di lokasi penelitian.

III.2 Jenis / Tipe Penelitian

Berdasarkan tujuannya, tipe penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan dan memberikan suatu bentuk penjelasan yang rinci dan lengkap mengenai pendidikan politik terpadu bagi masyarakat menuju Pemilu 2014 sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian murni karena penelitian ini memiliki orientasi akademis. Munculnya tema dan proses penelitian merupakan kebutuhan intelektual bagi peneliti sehingga didalamnya terdapat nilai kebebasan bagi peneliti untuk memilih permasalahan dan subjek penelitian.

Berdasarkan penggunaan waktunya, penelitian ini termasuk ke dalam penelitian *cross sectional*. Penelitian *cross sectional* adalah penelitian yang dilakukan dalam waktu tertentu dan tidak akan dilakukan penelitian lain di waktu yang berbeda untuk diperbandingkan. Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah pendidikan politik terpadu bagi masyarakat menuju Pemilu 2014 sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan studi kasus yaitu di Kota Bengkulu pada waktu tertentu sampai penelitian ini selesai dan tidak dimaksudkan untuk diperbandingkan dengan penelitian lain pada waktu yang berbeda.

Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian lapangan (*field research*). Sebagai penelitian lapangan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini lebih mengandalkan pada observasi langsung terhadap berbagai hal di lokasi penelitian serta wawancara secara mendalam kepada informan yang telah ditentukan, dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara.

III.3 Metode dan Strategi Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data dan analisa data secara kualitatif. Penelitian kualitatif lebih membicarakan mengenai bagaimana cara melihat dan mempelajari suatu gejala atau realitas. Moleong (2007) menyatakan bahwa :

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, ada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (hal. 101).

Menurut pernyataan Stacks (2007), terdapat sejumlah kelebihan dari penelitian kualitatif terhadap penelitian kuantitatif, seperti memiliki kekayaan data, data yang dikumpulkan bukanlah fakta impersonal, menyediakan pemahaman faktor luar dari perilaku normatif dan berguna pada masalah hubungan masyarakat tertentu. Menurutnya,

Qualitative research does provide the researcher with several important advantages over it's quantitative counterpart. First, the data are rich, in that they provide an in-depth understanding of a person, organization, event or other research object. Second, the data gathered are not impersonal facts; they are value based. Third, qualitative methods provide an ex post facto understanding of the normative behaviours of larger groups. Fourth, qualitative methods work best when public relations requires environmental scanning or monitoring in relation to a specific public relations problems (p. 102).

Selain itu, berkaitan dengan multiparadigma dari penelitian kualitatif, Nelson dalam Denzin dan Lincoln mengatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu disiplin ilmu yang interdisipliner, lintas disiplin dan terkadang berlawanan. Menurutnya,

Qualitative research is an interdisciplinary, transdisciplinary, and sometimes counterdisciplinary field. It crosscuts the humanities and the social and physical science. It is multiparadigmatic in focus. It is practitioners are sensitive to the value of the multimethod approach. They are committed to the naturalistic perspective and to the interpretive understanding of human experience. At the same time, the field is inherently political and shaped by multiple ethical and political positions (p. 103).

Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak selalu mengacu pada metode-metode yang non-positivistik, yakni penelitian yang sebagian besar mengacu pada proposisi dan teori-teori yang berlaku spesifik (*ideographic*); mementingkan *reflectivity* atau *authenticity*; dan menggunakan pendekatan induktif dan eksploratif (Hidayat, 2006, hal. 136).

Pada penelitian ini, pendekatan penelitian yang dipakai adalah positivis dengan metode penelitian kualitatif. Hidayat (2006) menyatakan bahwa pendekatan positivis merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengacu pada proposisi *nomothetic* (berlaku umum) dan ahistoris (tidak terkait pada suatu konteks historis yang spesifik). Pendekatan penelitian ini menyajikan metode-metode pengkajian validitas dan objektivitas penelitian kualitatif dengan metode serta prosedur kualitatif. Selain itu,

pendekatan positivis menerapkan pendekatan secara deduktif dalam mengkaji permasalahan penelitian. Hal ini diupayakan untuk memberi koridor mengenai pembahasan permasalahan penelitian ini.

Berdasarkan teknik pengumpulan data, penelitian ini menggunakan teknik *field research* dalam pengumpulan data, yang lebih mengandalkan pada observasi dan wawancara secara mendalam kepada informan yang telah ditentukan, dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara. Penelitian ini juga didukung oleh data-data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini, yang termasuk didalamnya studi kepustakaan, jurnal, surat kabar, peraturan perundang-undangan, film dokumenter dan dokumen-dokumen penelitian.

III.4 Narasumber / Informan

Informan adalah orang yang dianggap mampu dan mempunyai kompetensi untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pemilihan narasumber atau informan dalam suatu penelitian difokuskan pada representasi atas masalah yang diteliti. Oleh karena itu, proses perolehan data dari narasumber/informan harus didasarkan pada beberapa kriteria, sebagaimana yang dikemukakan oleh Neuman (2006) berikut :

- *The informant is totally familiar with the culture and is in position witness significant event makes a good informant*
- *The individual is currently involved in the field*
- *The person can spend time with the researcher*
- *Non analytic individuals make better informant. A no analytic informant is familiar with and uses native folk theory or pragmatic common sense (p.76).*

Berdasarkan pada kriteria tersebut, maka narasumber/informan yang terkait dengan permasalahan penelitian ini, antara lain ialah :

- Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu.
- Panitia Pengawas Pemilu Kota Bengkulu.
- Media (Televisi dan Cetak), selaku pihak eksternal yang berperan dalam penyampaian informasi pemilu.
- Wakil dari pihak masyarakat selaku pihak yang menjadi bagian dari pemilu di Kota Bengkulu.

III.5 Proses Penelitian

Proses penelitian ini dilakukan dengan menemukan terlebih dahulu fokus masalah yang dimulai dari pengumpulan berbagai informasi yang terkait dengan evaluasi sistem

kontrol pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah pemerintah kota Bengkulu. Didalam penyusunan kerangka teori, peneliti melakukan studi kepustakaan untuk menemukan kesesuaian teori dan konsep bagi pendidikan politik terpadu bagi masyarakat menuju Pemilu 2014 sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kemudian dalam pemakaian metode penelitian dipilih berdasarkan pengembangan teori dan konsep yang ditemukan yang disesuaikan dengan studi kepustakaan mengenai metode penelitian.

Pada tahap analisis temuan, peneliti melakukan kategorisasi berbagai macam temuan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian menganalisis data temuan tersebut berdasarkan operasionalisasi konsep yang dibuat. Terakhir, pada tahap pengambilan kesimpulan, peneliti menyimpulkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam pokok permasalahan dengan memberikan sejumlah saran.

PEMBAHASAN

Pemilu yang berlangsung di Kota Bengkulu pada tahun 2012 berlangsung 2 putaran. Pada proses pemilu tersebut banyak diwarnai oleh tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dilakukan dalam proses politik. *Money politics* sangat mudah ditemui disetiap sudut Kota Bengkulu ketika Pemilu berlangsung. Pengelembungan suara, pemanfaatan sarana dan prasarana publik untuk kegiatan kampanye. Tentu saja hal tersebut sangat memperhatikan, dimana *money politics* tidak akan terjadi jika pasangan calon Pemilu dan masyarakat sama-sama tidak ingin melakukan tindakan yang akan merugikan. Masyarakat harus mampu untuk menolak setiap kegiatan yang mengarah kepada kecurangan dalam Pemilu dan menentukan sikap. Tentu saja hal tersebut harus didukung dengan pengetahuan politik yang memadai bagi masyarakat.

Makna pemilihan umum yang paling esensial bagi suatu kehidupan politik yang demokratis adalah sebagai institusi pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma, dan etika. Sehingga sirkulasi elite politik dapat dilakukan secara damai dan beradab. Namun realitas pemilu saat ini nampaknya masih jauh dari harapan. Begitu banyak kasus atau masalah yang timbul menjelang pemilu atau bahkan setelah terjadi pemilu. Kita tidak bisa hanya menyalahkan pemerintah. Mungkin di sisi lain ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang membuat masalah ketika pemilu akan dilaksanakan. Kita juga sebagai warga negara yang baik seharusnya membantu aparaturnya pemerintahan daerah tempat kita tinggal agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan sesuai harapan kita. Adapun demokrasi itu di tandai dengan 3 (tiga) syarat yakni:

1. adanya kompetisi di dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan,
2. adanya partisipasi masyarakat, dan
3. adanya jaminan hak-hak sipil dan politik.

Untuk memenuhi persyaratan tersebut diadakanlah sistem pemilihan umum. Sistem pemilu dibagi menjadi dua kelompok yakni: *pertama, single – member constituency* / sistem distrik (satu daerah pemilihan memilih satu wakil). Dalam sistem distrik satu wilayah kecil memilih satu wakil tunggal atas dasar suara terbanyak. Untuk Dewan Perwakilan Daerah menggunakan distrik berwakil banyak, per provinsi sebanyak 4 wakil. Kelebihan sistem distrik antara lain: 1) karena kecil dan tidak terlalu besarnya distrik maka biasanya ada hubungan atau kedekatan antara kandidat dengan masyarakat di distrik tersebut, kandidat mengenal masyarakat serta kepentingan yang mereka butuhkan. 2) sistem ini akan mendorong partai politik untuk melakukan penyeleksian yang lebih ketat dan kompetitif terhadap calon yang akan diajukan untuk menjadi kandidat dalam pemilihan. Adapun kekurangan sistem distrik antara lain: 1) sistem ini kurang berjalan dengan baik karena perolehan suara kandidat yang kalah tidak diperhitungkan sama sekali atau suara tersebut dianggap hilang. 2) partai-partai kecil atau golongan/kelompok minoritas/termarjinalkan yang memperoleh suara yang lebih sedikit tidak akan terwakili (tidak memiliki wakil) karena suara mereka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini, kaum perempuan memiliki peluang yang kecil untuk bersaing mengingat terbatasnya kursi yang diperebutkan. 3) wakil rakyat terpilih akan cenderung lebih memperhatikan kepentingan rakyat di distriknya dibandingkan dengan distrik-distrik yang lain.

Kedua, sistem proporsional (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil). Dalam sistem ini satu wilayah besar memilih beberapa wakil. Ada dua macam sistem di dalam sistem proporsional, yakni; 1) *list proportional representation*, disini partai-partai peserta pemilu menunjukan daftar calon yang diajukan, para pemilih cukup memilih partai. Alokasi kursi partai didasarkan pada daftar urutan yang sudah ada. 2) *the single transferable vote*, para pemilih di beri otoritas untuk menentukan preferensinya. Dimana pemenangnya didasarkan atas penggunaan kuota.

Perbedaan pokok antara sistem distrik dan proporsional adalah bahwa cara menghitung perolehan suara dapat menghasilkan perbedaan dalam komposisi perwakilan dalam parlemen bagi masing-masing partai politik. Kelebihan sistem proporsional antara lain: 1) menyelamatkan suara masyarakat pemilih dimana suara kandidat yang lebih kecil dari

kandidat lainnya tetap akan diperhitungkan sehingga sedikit suara yang hilang. 2) memungkinkan partai-partai yang memperoleh suara atau dukungan yang lebih sedikit tetap memiliki wakil di parlemen karena suara mereka tidak otomatis hilang atau tetap diperhitungkan. 3) memungkinkan terpilihnya perempuan karena kursi yang diperebutkan dalam satu daerah pemilihan lebih dari satu. Kekurangan sistem proporsional antara lain: a) Sistem ini cenderung menyuburkan sistem multipartai yang dapat mempersulit terwujudnya pemerintahan yang stabil. b) Biasanya antara pemilih dengan kandidat tidak ada kedekatan secara emosional. Pemilih tidak atau kurang mengenal kandidat, dan kandidat juga tidak mengenal karakteristik daerah pemilihannya. Kandidat lebih memiliki keterikatan dengan partai politik sebagai saluran yang mengusulkan mereka.

Indonesia sudah menyelenggarakan sepuluh kali pemilihan umum sejak kemerdekaan hingga tahun 2009. Sistem pemilihan umum yang di anut oleh Indonesia dari tahun 1945-2009 adalah sistem pemilihan proporsional. Pemilu-pemilu paska pemerintahan orde baru tetap menggunakan sistem proporsional dengan system bahwa sistem ini dianggap sebagai sistem yang lebih pas untuk Indonesia. Sistem proporsional tetap dipilih menjadi sistem pemilihan umum di Indonesia dan bisajadi sistem ini yang akan terus di pakai. Hal ini tak lepas dari realitas yang pernah terjadi di sistem negara lain bahwa mengubahsistem pemilu itu merupakan sesuatu yang sangat sulit. Di Indonesia sendiri sistem proporsional telah mengalami perubahan-perubahan yakni dari perubahan proporsional tertutup menjadi sistem proporsional semi daftar terbuka dan sistem proporsional daftar terbuka.

Pemilu menjadi indikator yang paling mudah dalam menentukan sebuah negara tersebut demokratis atau tidak, karena Pemilu memberikan sebuah momentum kepada masyarakat untuk menentukan arah perkembangan sebuah negara. Pada Pemilu, masyarakat dapat memilih para wakilnya dan menentukan siapa yang akan memimpin sebuah negara pada nantinya. Untuk itu, momentum Pemilu juga membutuhkan sebuah pemaksimalan keterlibatan masyarakat. Tanpa adanya pemaksimalan pelibatan masyarakat, maka Pemilu hanya akan menjadi instrumen formal dan indikator penilaian demokrasi saja, tanpa adanya substansi. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan Pemilu harus terus ditingkatkan.

Terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan instrument untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan menjadi empat bentuk, yaitu sosialisasi, pendidikan

bagi pemilih, survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat. Adanya beberapa konsep dan sarana bagi partisipasi masyarakat tentu saja perlu untuk dimaksimalkan. *Pertama*, hal yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan proses sosialisasi tentang pentingnya Pemilu dalam sebuah negara yang demokratis, bukan hanya sosialisasi teknis penyelenggaraan Pemilu. Meskipun dalam ketentuan undang-undang menyatakan bahwa sosialisasi dilakukan terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu, namun sosialisasi segala hal yang melatarbelakangi penyelenggaraan Pemilu perlu untuk dilakukan. Hal ini menjadi penting karena penanaman pemahaman terkait dengan esensi dan kaidah-kaidah demokrasi merupakan inti penggerak semangat masyarakat untuk terus menjaga demokrasi dan penyelenggaraan Pemilu di Negara ini.

Kedua, pendidikan bagi pemilih perlu mendapatkan fokus yang jelas. Ini terkait dengan proses segmentasi pendidikan pemilih. Pemilih pemula merupakan segmentasi penting dalam upaya melakukan pendidikan bagi pemilih dan tentunya pendidikan bagi pemilih pemula ini tidak hanya dilakukan ketika masuk usia pilih. Namun lebih dari itu, pendidikan bagi pemula seyogyanya dilakukan sedini mungkin, sehingga pemahaman tersebut terbangun dan ketika sudah mencapai usia pemilih, para pemilih pemula sudah siap menggunakan hak pilihnya secara cerdas.

Ketiga, survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat yang kini banyak mendapatkan sorotan publik terkait dengan integritas pelaksanaannya. Banyak anggapan bahwa survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat dilakukan hanya untuk kepentingan profit saja. Namun, di satu sisi, perlu diperhatikan bahwa keberadaan kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat sangatlah penting. Kegiatan tersebut juga bisa dijadikan sebuah sarana untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. Untuk itu, kegiatan survei atau jajak pendapat dan penghitungan cepat perlu mendapatkan dukungan, karena kegiatan tersebut merupakan sarana yang tentu saja bukan hanya ditujukan untuk menghitung atau profit saja, namun lebih dari itu, ada proses pendidikan bagi para pemilih serta informasi terkait dengan penyelenggaraan Pemilu. *Keempat*, tentu saja terkait dengan peningkatan kinerja penyelenggara Pemilu, bukan hanya terkait dengan kinerja teknis penyelenggaraan, namun juga dalam hal penumbuhan kesadaran tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu, sehingga masyarakat bisa memahami partisipasi apa saja yang dapat dilakukan dan apa output dari partisipasi tersebut.

Pendidikan politik terpadu merupakan ejawantah dari kepercayaan manusia Indonesia kepada para pengelola pendidikan. Kepercayaan tersebut merupakan modal yang sangat luar biasa ampuhnya bagi pencurahan perhatian kemajuan dan peningkatan pendidikan politik. Kepercayaan tersebut bisa dimunculkan kembali jika pemerintah memiliki *political will* yang kuat dan konsisten terhadap kualitas pendidikan nasional, karena pada dasarnya pemerintah Indonesia hanya ada satu dan berada di bawah kekuasaan satu presiden dan satu wakil presiden dengan bekerja sama dengan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat). Apalagi menghadapi sistem pemerintahan Indonesia hasil pemilihan umum 2009 ini yang lebih menganut sistem presidensial, maka pemerintah memiliki kekuasaan yang luar biasa dalam menentukan hitam putih, merah biru, hijau kuningnya pendidikan nasional.

Pendidikan politik terpadu merupakan jawaban intelektual dari persoalan pendidikan yang semakin lama semakin tidak jelas visi dan arahnya. Dengan konsep pendidikan politik terpadu visi pendidikan nasional adalah jelas pemberdayaan manusia Indonesia dalam seluruh aspek kehidupan, seluruh sektor kehidupan, seluruh disiplin keilmuan, seluruh lapisan masyarakat, seluruh strata sosial, seluruh kerangka ajaran agama, seluruh etnis bangsa, seluruh budaya bangsa, seluruh tradisi lokal masyarakat, dan seluruh harapan manusia Indonesia. Pendidikan nasional terpadu artinya memberikan kesempatan kepada masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mengembangkan minat, bakat, potensi, kreativitas, dan keterampilannya yang kemudian didukung sepenuhnya dan diakui sepenuhnya oleh dunia industri serta pemerintah dengan aturan hukum yang jelas dan tegas.

Praktik pendidikan politik terpadu dapat digambarkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Pendidikan nasional terpadu secara politik merupakan strategi nasional pemerintah yang sedang berkuasa dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia untuk melepaskan diri dari ketergantungan dalam bentuk apapun dari negara lain. Berdiri di atas kekuatan, kemampuan, kekayaan, sumber daya alam, dan keterampilan sendiri adalah visi politik pendidikan nasional terpadu. Dengan visi ini dimungkinkan adanya kebanggaan bagi para pengelola pendidikan karena benar-benar diperhatikan oleh dunia industri lainnya. Politik pembangunan infrastruktur, suprastruktur, dan superstruktur harus memberdayakan seluruh lapisan masyarakat baik secara sosial, politik, ekonomi, budaya, maupun ideologi melalui pendidikan.
2. Dengan menjadikan pendidikan politik terpadu sebagai strategi nasional pemerintah, maka sebagai konsekuensi logis, konsekuensi, *administrative*, konsekuensi

responsibilitas, dan konsekuensi politik pemerintah harus menyediakan dana anggaran sesuai dengan tuntutan konstitusi hasil amandemen yang mengamanatkan 25 persen dari total APBN. Komitmen pengucuran dana sedemikian besar tentunya dibarengi dengan ketatnya nilai moralitas bangsa sedemikian rupa sehingga para pengelola tidak lupa diri dengan bergelimangnya dana anggaran pendidikan nasional terpadu. Hal ini harus mulai dirintis dari proses pendidikan tingkat dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Moralitas bangsa adalah satu-satunya tolok ukur keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan nasional terpadu. Karena dengan moralitas tinggi, maka kemungkinan bocornya anggaran dana akan dapat diminimalisir. Harapan ini bukan merupakan ilusi dan obsesi intelektual dan bersifat teoritik belaka, akan tetapi bila semua pihak memiliki komitmen bahwa siapa yang salah harus dipecat dan siapa yang jujur harus terus didukung, maka moralitas bangsa akan menjadi baik dan itu harus dimulai dari sekarang dan melalui jalur politik pendidikan terpadu.

3. Politik pendidikan dalam rangka pemberdayaan seluruh masyarakat Indonesia dan penanaman moralitas merupakan sasaran dan tujuan utama pendidikan nasional terpadu. Moralitas bangsa merupakan landasan spiritual yang tidak mampu dibangun dalam waktu singkat. Penanaman moralitas bangsa harus dipupuk dan tidak pernah lengah sebarangpun dalam proses pendidikan. Oleh karena itu, pelaksanaan proses pendidikan dari sejak tingkat dasar, menengah sampai perguruan tinggi harus senantiasa dikawal moralitas peserta didik. Peserta didik yang secara moral tidak lolos dan memiliki standar moral rendah tidak berhak mengenyam pendidikan lebih tinggi. Karena semua itu akan sangat merugikan masyarakat lainnya. Di saat yang sama pemberdayaan seluruh potensi, minat, bakat, kreativitas, dan keterampilan baik di bidang teknologi, budaya, tradisi, seni, intelektual, sastra dan sebagainya harus mendapatkan prioritas utama dalam pendidikan. Sebagaimana diungkapkan atas semua itu mendapat dukungan penuh dari politik pemerintah yang sedang berkuasa dan dunia industri yang terkait. Pemerintah terus mengawal kerja sama dan jaringan kerja antara lembaga pendidikan dengan dunia industri sebagai langkah untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap negara lain. Sebagaimana juga diungkapkan di atas industri di sini mencakup industri dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat dan bangsa.

Barangkali inilah konsep pendidikan politik terpadu yang mungkin masih sangat sederhana dan kurang memadai. Harap dapat dimaklumi karena merupakan gagasan awal

sebagai upaya untuk memberdayakan seluruh masyarakat, menjadi sangat penting dalam konteks pendidikan nasional terpadu karena model pendidikan yang sedang berlangsung sampai saat ini ternyata hanya memberdayakan sebagian kecil anggota masyarakat, khususnya yang memiliki kesempatan dan kemampuan untuk mengakses ke pusat kekuasaan. Bagi yang tidak memiliki akses sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menikmati keberhasilan pembangunan pendidikan yang visi politiknya tidak jelas.

Pendidikan selama ini tidak memiliki visi yang jelas tentang pemberdayaan manusia Indonesia sendiri. Memang hal ini tergantung pada sistem politik dan kebijakan pendidikan pemerintah, selama pemerintah lebih menitikberatkan pada pemanfaatan dan pengagungan produksi impor maka produksi dalam negeri akan terus mengalami kemerosotan atau bahkan mati sama sekali. Politik ekonomi pemerintah selama ini tidak sejalan dengan politik pendidikannya, politik pendidikannya juga tidak sesuai dengan politik budayanya, demikian juga politik budayanya tidak sesuai dengan politik ideologinya. Atau dengan kata lain antara politik yang satu dengan politik yang lain tidak ada yang sejalan, seirama, dan senafas. Misalnya dari segi ideologi, nasionalisme adalah ideologi yang paling dominan, namun ketika berada dalam politik ekonomi dan politik militer berbeda karena lebih mementingkan kepentingan luar negeri dalam arti menggunakan teori-teori Barat dan persenjataan impor. Ini jelas menunjukkan tidak adanya keselarasan dan kesesuaian antara politik ideologi dan politik ekonomi maupun militer. Demikian juga yang terjadi dengan politik pendidikan dan politik lainnya tidak ada yang selaras. Untuk menyelaraskan perlu kiranya digagas politik pendidikan nasional terpadu yang mencakup dan sejalan dengan politik ideologi, politik pemerintahan, politik budaya, politik ekonomi, politik hukum, dan politik-politik lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas visi pendidikan terpadu sebagai upaya untuk keluar dari keterpurukan multidimensional bangsa Indonesia ini.

Pendidikan pada dasarnya adalah otak dari sebuah badan besar yakni negara Indonesia. Jika otak tersebut dipisah-pisah baik energi, potensi maupun kekuatannya, maka kinerja otak tersebut tidak akan bisa maksimal. Demikian juga dengan pendidikan bila kekuatan, energi, dan potensinya dipisah-pisahkan ke masing-masing departemen, maka *performance*-nya juga tidak akan bisa mencapai maksimal. Sebagai kekuatan utama dalam pendidikan, maka pendidikan terpadu ini mencakup seluruh disiplin keilmuan yang berkembang saat ini. Kinerjanya dapat ditentukan dengan target jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Namun semua itu tidak boleh melupakan aspek moralitas yang menjadi kendali utama sistem pendidikan terpadu ini. Sebab tanpa adanya kendali

moralitas yang tinggi, maka pemusatan kekuatan, potensi dan energi akan menjadi sasaran empuk bagi para "tikus-tikus intelektual" yang tidak mengenal tempat dan waktu itu. Dengan demikian, pemanfaatan departemen pendidikan sebagai muara satu-satunya seluruh proses pendidikan menjadi mudah dimonitor. Tentunya semua ini didasarkan pada legislasi dan hukum yang jelas dan mantap tidak *interpretable* dan multi tafsir.

Kesimpulan

Pemilihan umum telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Pemilihan umum adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan. Pemilu adalah pengejawantahan sistem demokrasi. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen, dan dalam struktur pemerintahan. Ada negara yang menyelenggarakan pemilihan umum hanya apabila memilih wakil rakyat duduk dalam parlemen, akan tetapi ada pula negara yang juga menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih para pejabat tinggi negara. Umumnya yang berperan dalam pemilu dan menjadi peserta pemilu adalah partai-partai politik. Partai politik yang menyalurkan aspirasi rakyat dan mengajukan calon-calon untuk dipilih oleh rakyat melalui pemilihan itu. Dalam ilmu politik dikenal bermacam-macam sistem pemilihan umum, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu: *single member constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut sistem distrik). *Multy member constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan *proporsional representation* atau sistem perwakilan berimbang).

Saran

Politik merupakan kualitas yang paling penting untuk membangkitkan dan mengorganisasikan minat dan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan ditingkat daerah. Pada unit pemerintahan yang lebih besar, politik memegang peranan penting dalam proses pemerintahan perwakilan. Untuk mewujudkan aspirasi masyarakat guna mewujudkan *good governance*. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas dan Depdagri. 2002. *Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah*. Hal 18
- Cholisin. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta
- Chadwick, Bruce A, Howard M. Bahr, Stan L. Albrecht. *Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial*. Semarang: IKIP Semarang Press. 1991
- Creswell, John W. *Research Design (Qualitative & Quantitative Approaches)*. Jakarta: KIK Press. 2003
- Gormley, T. William Jr, and J. Balla, Steven, 2004. *Bureaucracy and Democracy, Accountability and Performance*. Washington D.C.: CQ Press.
- Harian Seputar Indonesia. (2011). *Konsolidasi Sistem Pemilu*. Jakarta.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Koentjaraningrat. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1990
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, Hadari. 1985. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Neuman, W, Laurance. 2003. *Social Research Methods, Qualitative & Quantitative Approaches 5th Edition*. USA: Pearson Education Inc.
- Patton, Michael Quinn. 2002. *Qualitative Research and Evaluation Methods, 3rd Edition*. Thousand Oaks, California: Sage Publications, Inc.
- Polidano, C., "Why Bureaucrats Can't Always Do What Ministers Want: Multiple Accountabilities in Westminster Democracies." *Public Policy and Administration* 13, No. 1, 1998.
- Prabowo. 2000. *Pembelajaran Fisika Dengan Pendekatan Terpadu Dalam Menghadapi Perkembangan IPTEK Millenium III*. Jakarta: Himpunan Fisika Indonesia.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah Ratih Sulistyastuti. *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media. 2007
- Suseno, F. M. (1999). *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta. 2007
- UNDP. 2001. *Transparency and Accountability*.
<http://www.pogar.org/themes/transparency.html>.

William T. Gromley and Steven J. Balla. 2004. *Bureaucracy and Democracy, Accountability and Performance*. Washington DC : CQ Press.

---, ----. *Webster International Dictionary*. Massachussets: Merriam Company.

Pendidikan Politik

ORIGINALITY REPORT

34%

SIMILARITY INDEX

34%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%

★ srirosmayantimenggila.blogspot.com

Internet Source

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%